



BULETIN **PARLEMENTARIA**

NOMOR: 891/II/XII/2015

KOMISI V DESAK SUDETAN CILIWUNG-KBT DITUNTASKAN



**LEGISLATOR
APRESIASI
PILIHAN MUNDUR
DIRJEN PAJAK**



**FADLI:
KITA MAMPU
PRODUKSI
ALUTSISTA**

Jangan lewatkan
info DPR terkini
dan live streaming
TV Parlemen di
www.dpr.go.id



KOMISI V DESAK SUDETAN CILIWUNG-KBT DITUNTASKAN



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR dipimpin Fary Djemi Francis melihat langsung pembangunan jalur Sudetan Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT)

Tim Kunjungan Komisi V DPR, di Jakarta, Selasa (1/12) melakukan peninjauan ke pembangunan jalur Sudetan Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT).

“Kedatangan kami untuk melihat secara langsung, terkait dengan permasalahan pembangunan sudetan, dan kami mendapat informasi semestinya pembangunan ini ditargetkan selesai tahun ini, karena persoalan lahan akhirnya belum selesai,” kata Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis di hadapan wartawan.

Tim Komisi V DPR kali ini juga di dampingi Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane BBWSCC Teuku Iskandar.

Belum terselesaikannya persoalan pembebasan lahan menurut Fary, diperlukan adanya koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membantu memberikan dukungan.

“Anggaran kurang lebih 760 miliar yang kita sudah berikan untuk pembangunan ini tidak sedikit, dan kita harapkan, betul-betul bisa di manfaatkan, dan penuntasan sudetan ini bisa di selesaikan, serta persoalan penanggulangan banjir bisa diatasi,” jelas Fary.

Sementara itu, ditempat yang sama, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane BBWSCC Teuku Iskandar menjelaskan sampai saat ini pengerjaan terowongan dari titik keluarnya air (outlet) sampai arriving shaft (tiang beton) yang merupakan titik tengah sudetan sudah hampir selesai, dan sementara pengerjaan dari titik masuknya air (inlet) yang berlokasi di Jalan Bidara Cina masih terkendala pembebasan lahan.

Proyek ini menurut Iskandar, diharapkan bisa mengurangi volume air di Sungai Ciliwung sebanyak 60 meter kubik per detik. Saat ini, jelas Iskandar, rata-rata debit air di Sungai Ciliwung

mencapai 570 meter kubik per detik. “Dengan adanya sudetan, maka debit air di Sungai Ciliwung diharapkan bisa dikurangi menjadi 510 meter kubik per detik,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menerangkan, terkait terhambatnya proyek pembangunan sudetan ini karena kendala pembebasan lahan, dan diajukannya *class action* dari warga.

“Kalau gugatan *class action* dapat cepat diselesaikan, maka saya yakin proyek ini bisa dikerjakan satu minggu setelahnya,” terangnya.

Bambang menjelaskan, di Bidara Cina ada tiga RW yang terdampak proyek sudetan ini, yakni RW 04, 05, dan RW 14. Untuk RW 05 dan RW 14 menurut Bambang tidak masalah karena lahannya sudah selesai dibebaskan.

“Yang belum RW 04. Kalau RW 05 dan RW 14 sudah. Ada 134 bangunan yang sudah diratakan dan warganya direlokasi ke Rusun Cibesal,” ujar Bambang.

Terkait adanya gugatan *class action* ini, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis, DPR bersama Kementerian PU melalui Dirjen Sumber Daya Air akan mendorong untuk cepat diselesaikan.

Sudetan Ciliwung-KBT merupakan salah satu upaya Pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat untuk mengatasi terjadinya genangan maupun banjir di Jakarta. Proyek ini masih terkendala permasalahan pembebasan lahan milik warga.

Dari total lahan seluas 11.000 meter persegi, sampai saat ini baru berhasil dibebaskan seluas 4.300 meter persegi atau baru 40 persen.

Lahan yang sudah selesai pengadaannya tersebut utamanya berada di daerah outlet, atau pintu pembuangan

BULETIN PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH: Dr.

Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Irfan, S.Sos, MMSI (Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: M. Ibnur Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos; Ketut Sumerta, S. IP

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos; Supriyanto;

Agung Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati; Muhammad Husen; Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO: Eka Hindra

FOTOGRAFER: Rizka Arinindya; Naefuroji; M. Andri

Nurdriansyah; Yaserto Denus Saptoadji; Andi Muhamad; Jaka Nugraha

SIRKULASI: Abdul Kodir, SH, Bagus Mujiharjanto

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.III Gedung Nusantara

II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp.

(021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

air dari Sungai Ciliwung ke KBT.

Sementara, lahan yang sedianya menjadi titik inlet disisi Sungai Ciliwung belum selesai pembebasannya. Lahan yang dimaksud terletak di kawasan Bidara Cina.

Pembebasan lahan ini diperlukan untuk membangun jalur masuknya air (inlet) dari Ciliwung menuju sudetan yang memanjang hingga ke Jalan Otista III dan KBT.

Usai melakukan peninjauan di

proyek sudetan Ciliwung-KBT, rombongan melanjutkan kunjungan ke proyek normalisasi Kali Ciliwung, di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (NT), FOTO : EKA HINDRA/PARLE/HR

BPK SERAHKAN AUDIT PELINDO II

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi menyerahkan hasil audit atas PT. Pelindo II. Laporan audit tersebut merupakan permintaan Pansus Angket Pelindo II DPR RI. Laporan audit diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.

Bertempat di ruang rapat Pimpinan DPR, Nusantara III, Rabu (2/12), Wakil Ketua BPK Achsanul Qosasi, menyatakan, sebetulnya laporan hasil audit ini menjadi rahasia negara. Untuk itu, ia minta izin kepada Pimpinan DPR untuk membuka sifat rahasia laporan hasil audit tersebut. Biasanya audit dilaporkan kepada DPR per enam bulan sekali. Namun, ini merupakan permintaan khusus dari Pansus.

Taufik Kurniawan sendiri berkomentar, sesuai UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), laporan audit yang secara khusus diminta DPR untuk tujuan tertentu tidak melanggar kerahasiaan. Dengan menyerahkan kepada Pimpinan DPR, sebagai Wakil Ketua BPK, Achsanul bisa menyampaikan hasil audit ini secara terbuka dan detail di hadapan Pansus Angket Pelindo II DPR.

Audit atas kontrak konsesi JICT yang diserahkan kepada



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menerima audit Pelindo II dari Wakil Ketua BPK Achsanul Qosasi

perusahaan asal Hongkong, Hutchison Port Holdings menjadi bagian audit yang sangat penting bagi Pansus. Dari hasil audit tersebut akan terlihat penyelewengan yang merugikan keuangan negara. Pertemuan berlangsung singkat. Usai menyerahkan laporan audit, Achsanul bergegas menuju rapat Pansus Pelindo II untuk memenuhi undangan rapat.

(MH) FOTO : NAEFUROJI/PARLE/HR

FADLI: KITA MAMPU PRODUKSI ALUTSISTA

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Fadli Zon yakin, PT Dirgantara Indonesia, mampu membuat sejumlah Alutsista yang dibutuhkan Indonesia untuk pertahanan dan keamanan. Apalagi, produk PT DI juga sudah dipakai oleh sejumlah negara lain.

Hal ini dikatakan Fadli, menanggapi pernyataan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Agus Supriatna yang menyatakan bahwa PT DI belum mampu membuat Alutsista untuk TNI.

“Itu coba didiskusikan dulu, apa betul memang tidak bisa. Karena kabar yang beredar, PT DI sudah bisa membuat sejumlah Alutsista yang bahkan dipakai oleh negara lain,” kata Fadli, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Selasa (1/12/15).

Politisi F-Gerindra itu mengatakan,

jika bisa diproduksi di dalam negeri, sebaiknya dimaksimalkan produksi di dalam negeri. “Kecuali kita memang tidak mampu. Saya yakin kita cukup mampu,” imbuh politisi dapil Jawa Barat itu.

Di lain kesempatan, Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengaku bingung dengan pernyataan Kasau Agus Supriatna. Padahal, di setiap kesempatan Presiden Jokowi selalu kagum atas prestasi anak bangsa.

“Terlalu prematur kalau kemudian KSAU memvonis (PT DI) tidak mampu membuat sayap. Karena mengacu kepada Nawacita yang disampaikan kepada Pak Jokowi, bahwa beliau ingin mengangkat industri dalam negeri,” ujar Tamliha.

Politisi F-PPP itu mengatakan, KSAU



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

harusnya mengerti apa yang disampaikan dan diinginkan Presiden Jokowi dengan lebih mengutamakan produk karya anak negeri seperti pembelian helikopter milik PT DI yakni Super Puma EC 225, ketimbang memilih Agusta Westland (AW) 101 buatan Inggris.

“Sebaiknya semua pihak menghormati keinginan Jokowi, dan melak-

sanakan hasil dalam negeri, karena itu merupakan pendapat murni dalam mewujudkan Nawacita,” imbuh politisi asal dapil Kalsel itu.

Sebagaimana diketahui, Kasau Marsikal Agus Supriatna menyatakan bahwa PT DI belum bisa membuat produksi dalam negeri alat utama sistem persen-

jataan untuk TNI. Hal itu dibuktikan dengan PT DI yang selalu bekerjasama dengan perusahaan militer di luar negeri.

Karena itu TNI AU tak memilih helikopter EC-725 Cougar dari PT DI untuk heli VVIP Presiden Jokowi. Menurut Agus, heli AW-101 buatan dari luar

negeri, dan hal itu sudah masuk dalam rencana strategis 2015-2016. Pihaknya memilih heli AW-101 atas kajian lantaran TNI AU membutuhkan heli angkut berat. Helikopter AW-101 memiliki kabin dengan ketinggian 180 cm dan kapasitas angkut 80 ton, serta mempunyai tiga mesin. (SF), FOTO : ANDRI/PARLE/HR

DPR Akan Bahas UU KPK Jika Ada Ampres

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, mustahil membahas revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) kalau tidak ada Ampres (Amanat Presiden). Hal itu disampaikan kepada wartawan di Lobi Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Rabu (2/12).

Dijelaskan Politisi dari Fraksi PKS ini, saat rapat konsultasi dengan Presiden sekitar sebulan yang lalu, Pimpinan DPR menjalankan mandat dari Bamus (Badan Musyawarah) DPR yang meminta pimpinan agar bertanya kepada Presiden terkait wacana revisi UU KPK dengan empat point. Perubahan Empat point tersebut sebenarnya sudah dikoordinasikan oleh Menkopolkam dengan KPK. Pada pertemuan itu Presiden mengatakan “kita lihat waktu”.

“Saat itu kami menyatakan sikap kepada Presiden, bahwa kami tidak ingin DPR kembali menjadi korban yang seolah-olah menginginkan perubahan.

Kami hanya memberikan pertimbangan. Waktu itu pertimbangan kami tidak bisa dibantah, dan penilaian kita sama bahwa KPK harus diawasi. Tidak ada lembaga di dunia ini yang tidak diawasi. Dari sikap Presiden tersebut, maka kami memutuskan bahwa kami baru akan membahas revisi UU KPK jika Presiden setuju membahasnya,” papar Fahri.

Disisi lain Fahri melihat, ada perbedaan tone antara Presiden dan Wakil Presiden terkait revisi UU KPK, dan itu merupakan hal yang biasa. Namun kini dikatakan Fahri, keduanya harus datang dengan suara yang sama, satu, apakah setuju atau tidak.

“Jika presiden setuju untuk membahas Undang-undang KPK, ya silahkan kirim Ampres. Jangan diputar-putar seolah DPR yang nafsu ingin merevisi undang-undang ini. Namun jika Presiden tidak ingin membahasnya, maka hal itu tidak akan menjadi undang-



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

undang,” ungkap Fahri.

Ditambahkannya, ada satu pengertian yang harus diketahui masyarakat dimana pembuatan undang-undang itu bukan semata urusan DPR, melainkan juga urusan Presiden atau Pemerintah. Satu undang-undang tidak akan menjadi UU jika Pemerintah atau DPR tidak ingin membahasnya. Begitupun dengan revisi UU KPK ini. (AYU), FOTO : DENUS/PARLE/HR

KEUTUHAN NKRI TAK BOLEH DITAWAR



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung tindakan aparat kepada oknum tidak bertanggungjawab yang ingin memecah belah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun tentunya dengan tindakan yang sesuai aturan.

Hal ini dikatakan Fadli, ketika menanggapi kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh teroris di Poso, Sulawesi Tengah pada Minggu (29/11/15) lalu, yang mengakibatkan satu Anggota TNI menjadi korban.

Berselang sehari kemudian, satu Anggota TNI juga menjadi korban tembakan orang tak dikenal di Kampung Namuni Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya Papua.

“Ini (aparat) kita dukung untuk mempertahankan keutuhan NKRI, dan

untuk melakukan tindakan yang sesuai aturan,” kata Fadli, usai menerima Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Selasa (1/12/15).

Politisi F-Gerindra ini juga menegaskan, memang diperlukan ukuran yang tepat dalam menangani masalah di daerah sensitif.

“Kita juga harus menjamin, keutuhan NKRI merupakan sesuatu yang tidak boleh di tawar,” imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sebagaimana diberitakan di berbagai media, terjadi kontak tembak di Dusun Gayatri, Desa Maranda, Kecamatan

Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), antara anggota TNI dan kelompok diduga teroris, pada Minggu (29/11/15).

Dalam baku tembak tersebut, seorang anggota Raider 712 yang juga pasukan Satgas Camar Maleo, Serka Sainuddin (32), tewas usai terkena tembakan dari kelompok orang tidak dikenal (OTK) tersebut. Insiden baku tembak tersebut bermula saat pasukan Satgas Camar Maleo melakukan patroli di Dusun Gayatri, Poso.

Berselang sehari kemudian, seorang Prajurit TNI yang bertugas di Membramo, ditembak orang tidak dikenal pada Senin (30/11/15) kemarin. Peris-

tiwa bermula saat Kodam Cendrawasih mengirimkan tiga perwira penghubung di wilayah yang tidak memiliki Komando Distrik Militer (Kodim) tersebut.

Prajurit yang tewas atas nama Mayor Infanteri Jhon De Fretes, sebelumnya melakukan patrol dengan ditemani dua anggota. Ketiga personel itu dihadang oleh 10 orang bersenjata. Meski sudah mengaku sebagai pendeta, kelompok tersebut tetap memuntahkan timah panas terhadap prajurit TNI. Dua anggota lompat di sungai berenang, satu korban pun tewas dan ditemukan di pinggir sungai. (SF), FOTO : ANDRI/PARLE/HR

Aparat Kepolisian Harus Persuasif Tindak Aksi Demo Buruh

Aparat Kepolisian diharapkan tidak melakukan tindakan represif terhadap buruh yang melakukan aksi demo atau unjuk rasa. Apalagi, jika para buruh tak melanggar peraturan. Seharusnya, aparat kepolisian harus tetap bertindak persuasif.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Fadli Zon, usai menerima Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Selasa (1/12/15) petang. Fadli fokus bicara mengenai tindakan represif polisi, dan usulan Panitia Khusus (Pansus) Pengupahan. Fadli didampingi Ketua Komisi V DPR, Fary Djemy Francis (F-Gerindra).

“Kita melihat memang polisi seharusnya lebih persuasif dalam menangani demonstrasi ataupun unjuk rasa. Karena walau bagaimanapun, buruh juga memiliki peran penting dalam produksi. Dan sebagian besar rakyat kita juga selain petani, juga buruh,” kata Fadli.

Politisi F-Gerindra ini menilai, tindakan represif tidak akan malah membuat buruh menjadi produktif, sehingga polisi harus bertindak lebih persuasif. Ia melihat tindakan represif ini, dalam satu kepentingan yang agak berbeda dibanding kepentingan nasional. Jika tindakan represif tetap dilakukan, maka akan menimbulkan tindakan perlawanan dimana-mana.

“Kami menghimbau kepada Kapolri dan aparat kepolisian secara umum, dalam menangani unjuk rasa buruh, apalagi mereka juga berusaha untuk tetap tertib, itu harus secara persuasif, jangan represif,” himbau Fadli.

Menanggapi soal Pansus Pengupahan yang diusulkan KSPI, Fadli melihat ini perlu disosialisasikan terlebih dahulu. Sehingga, anggota Dewan mengetahui sejauh mana urgensi permasalahan ini.

“Jika memang ini sudah ada urgensinya, dan kita perlukan, maka hal ini juga perlu kita dorong agar tercipta Pansus yang membela kepentingan buruh di Indonesia,” kata politisi asal dapil Jawa Barat itu, sembari mengingatkan, Pemerintah seharusnya sensitif dalam mengambil kebijakan, terutama



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

yang melibatkan publik, khususnya buruh.

Sebelumnya, Ketua KSPI, Said Iqbal menyatakan bahwa tindakan represif yang dilakukan kepolisian kepada buruh agar segera dihentikan. Hal ini dianggap menutup ruang demokrasi. Padahal, buruh sudah melakukan aksi sesuai prosedur.

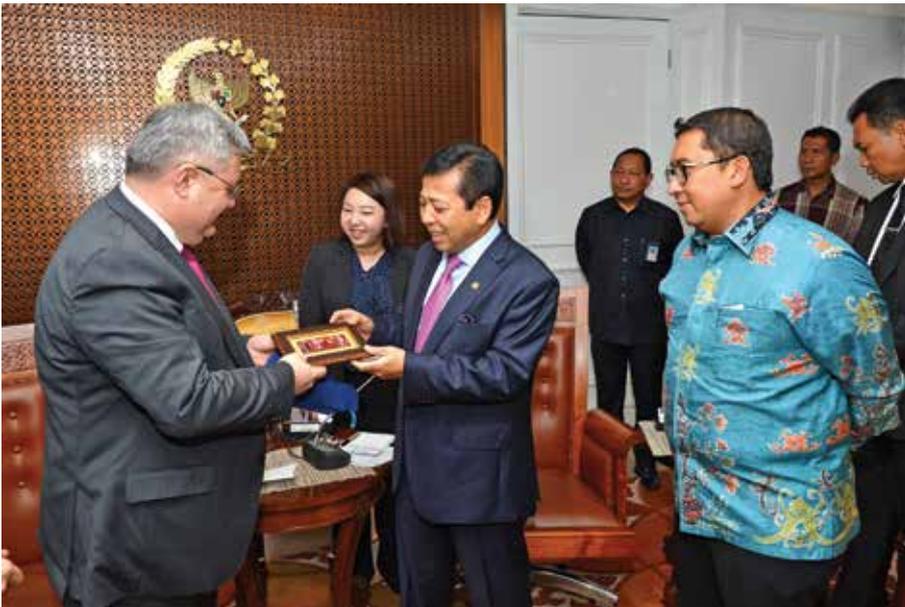
Kasus 30 Oktober 2015 lalu di depan Istana Negara, mengakibatkan 25 buruh ditangkap. Padahal itu aksi biasa, hanya melanggar waktu aksi, tidak ada bentrokan atau perlawanan dari buruh. Memang diakui aksi kami melebihi waktu yang telah ditentukan. Itu cukup ditegur, malah ini 25 buruh ditahan. Bahkan, Sekjen KSPI juga ikut ditahan dan dijadikan tersangka,” jelasnya.

Sementara soal pembentukan Pansus Pengupahan, hal ini sebagai bentuk penolakan terhadap PP No 78 Tahun 2015. Pasalnya, aturan ini dianggap tidak memihak kepada buruh.

“Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan Pemerintahan, khususnya untuk buruh, namun juga diiringi dengan tindakan represif kepada buruh. Untuk itu kami meminta kepada DPR, untuk menjadi *check and balance*, sesuai fungsinya yakni pengawasan kepada Pemerintah,” kata Said. (SF),

FOTO : ANDRI/PARLE/HR

DPR TERIMA PARLEMEN GEORGIA



Pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon menerima Delegasi Parlemen Georgia

Ketua DPR RI Setya Novanto menerima kunjungan delegasi Parlemen Georgia. Dalam pertemuan tersebut kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama diantara kedua parlemen serta mendorong kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian pada hubungan *people to people*.

“Kami menyambut baik hubungan perdagangan kedua negara menunjukkan tren yang terus meningkat. Harap-

annya terwujud hubungan *people to people* yang lebih baik di bidang sosial, budaya, pendidikan dan pariwisata,” kata Ketua DPR dalam pertemuan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Ia menambahkan kerja sama parlemen dua negara dapat ditindaklanjuti GKSB (Grup Kerja Sama Bilateral) yang telah dibentuk DPR. Novanto juga menyambut baik undangan untuk ber-

kunjung ke negara yang dulu pernah bergabung dengan Uni Soviet ini.

Sementara itu Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon yang turut hadir dalam pertemuan tersebut juga menilai positif upaya peningkatan kerja sama kedua parlemen. Sebagai Ketua GOPAC (Organisasi Parlemen Global Antikorupsi) ia juga mengajak Parlemen Georgia untuk bergabung.

Ketua Delegasi Parlemen Georgia David Usupashvili dalam pertemuan tersebut mengaku terkesan dengan keragaman Indonesia. “Kami baru saja berkunjung ke Museum Nasional dan terkagum dengan keragaman dan harmoni di Indonesia, rasanya perjalanan panjang 14 jam ke sini terasa singkat. Semoga kesepahaman antar dua negara semakin baik dan tidak ada lagi kendala untuk meningkatkan hubungan,” papar dia.

Usai pertemuan tersebut kedua pimpinan parlemen saling bertukar cinderamata. Fadli Zon menyerahkan sebilah keris, senjata tradisional khas Indonesia. Rombongan delegasi parlemen Georgia terlihat mengagumi cinderamata tersebut. “Ini senjata untuk perdamaian ya, bukan untuk perang,” ujar David disambut tawa hangat peserta pertemuan. (IKY), FOTO : DENUS SAPTO AJI/PARLE/HR

MKD VOTING, PENGADUAN MENTERI ESDM LANJUT

Perbedaan pendapat anggota Mahkamah Anggota Kehormatan Dewan (MKD) soal status pengaduan Menteri ESDM tentang dugaan pelanggaran etik oleh Ketua DPR Setya Novanto akhirnya diputuskan lewat mekanisme pemungutan suara (*voting*). Mayoritas anggota MKD memilih, kasus layak dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu pemanggilan para saksi.

“Alhamdulillah, hasil *voting* menunjukkan mayoritas memilih melanjutkan persidangan dengan menuntaskan jadwal persidangan,” kata Ketua MKD Surahman Hidayat yang memimpin jalannya rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/12/15).

Dalam proses pemungutan suara ini, MKD menetapkan dilaksanakan secara terbuka. Wartawan yang sejak awal mencermati jalannya sidang terlihat terkejut ketika dibolehkan memasuki ruang sidang memantau proses pemungutan suara.

Voting dilakukan dengan dua tahap. Pada tahap pertama anggota MKD diminta memilih opsi melanjutkan sidang dengan pengesahan jadwal pemeriksaan atau tidak melan-



Ketua MKD Surahman Hidayat

jutkan sidang karena tidak cukup hasil verifikasi dan alat bukti.

Hasilnya 11 anggota MKD berdiri dan memilih opsi melanjutkan sidang. Enam anggota yang menolak melanjutkan sidang adalah Sufmi Dasco Ahmad dan Supratman (FP Gerindra), Kahar Muzakir, Adies Kadir dan Ridwan Bae (FP Golkar) dan Zainut Tauhid (FPPP).

Tahap kedua pemungutan suara, anggota MKD diminta memilih mengesahkan jadwal persidangan atau menun-

taskan verifikasi. Hasilnya 9 orang berdiri sebagai bentuk dukungan pada pilihan melanjutkan jadwal persidangan.

Pimpinan sidang kemudian mengumumkan agenda pemeriksaan saksi yaitu Rabu (2/12) memanggil pihak pengadu yaitu Menteri ESDM Sudirman Said, Kamis (4/12) memeriksa dua saksi pengusaha Riza Chalid dan Dirut PT Freeport Maroef Sjamsoeddin. Sedangkan pemeriksaan Setya Novanto dijadwalkan Senin (7/12). (IKY), FOTO : JAKA NU-GRAHA/PARLE/HR

Minuman Beralkohol Tidak Punya Dampak Positif Apapun

Anggota Pansus RUU Larangan Minimal Beralkohol (Minol) Mohammad Syafii mengatakan, anggota DPR periode ini memiliki kesamaan pandangan bersama pemerintah bahwa RUU Minol harus diselesaikan pada Juni 2016. Terkait judul RUU Larangan bukan Pengaturan, sebetulnya minol ini tidak punya dampak positif apapun.

“Substansi yang akan dibahas adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, sebab sudah jadi fakta bahwa kerusuhan, kecelakaan dan perkelaian serta tindak kejahatan itu berawal dari konsumsi minuman keras. Dunia sepakat minuman keras jadi sumber berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum,” tandas politikus Gerindra Rabu (2/11).

Karena itu lanjut anggota Komisi III yang akrab disapa Romo ini, Pansus sepakat memakai judul Larangan Minol. Namun diakui Indonesia yang multietnis ini ada warga-warga tertentu yang tidak bisa dipisahkan dari minol, dan ini menjadi pengecualian yang juga akan diatur dalam RUU.

“Memang minol dilarang baik kadar A 1-5%, B hingga 20% maupun kadar C diatas 50%. Namun ada pengecualian untuk tempat pariwisata dan hotel kelas tertentu juga acara adat tertentu. Ini perlu ada kejelasan seperti pengaturan anak dalam acara adat bagaimana,” ujarnya.

Yang dimaksud minol, kata Romo, minuman yang mengandung etanol, tapi juga mengandung methanol, isopanol termasuk minuman racikan tradisional. Kalau racikan itu bisa menimbulkan hal-hal sebagaimana minol, maka termasuk dilarang yang akan diatur dalam RUU.

Ada masukan Disrekrim Polda Metro Jaya bahwa peristiwa yang disebabkan oleh pengemudi mabok atau darahnya mengandung alkohol diatas ambang batas, ternyata peris-



Anggota Pansus RUU Minol Mohammad Syafii

tiwa dan korban sudah banyak tidak aturannya. Bahkan polisi kesulitan mengaitkan peristiwa dengan penyebab mabuknya pengemudi karena UU yang mengatur belum ada.

“Mereka justru gembira DPR mengajukan RUU ini dan telah memberi masukan yang terus terang belum terpikir oleh Pansus Minol. Ini luar biasa, UU ini memang ditunggu kehadirannya oleh masyarakat, kelangsungan anak bangsa agar kehidupannya jauh lebih baik dari yang mereka dapatkan hari ini,” kata Romo menambahkan. (MP) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/HR

Komisi X Kecewa Serapan Anggaran Kemenristekdikti TA 2015

Komisi X DPR kecewa dengan serapan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Posalnya, hingga 30 November 2015 anggaran baru terserap 61,95 persen. Padahal, tahun anggaran tersisa kurang dari satu bulan lagi.

Raut kekecewaan pun diungkapkan

oleh Anggota Komisi X DPR, Sutan Adil Hendra. Ia menilai, untuk mencapai target penyerapan anggaran secara maksimal untuk tahun anggaran 2015, dirasa masih terlalu jauh.

“Serapan anggaran tersebut, masih jauh dari yang kita harapkan. Untuk itu, kita minta betul, karena kita lihat

serapan anggaran yang kurang dari 62 persen, sedangkan target sampai akhir tahun sekitar 85,52 persen, itu kan cukup jauh,” kata Sutan, saat rapat kerja dengan Menristekdikti Mohamad Nasir dan jajaran, di Gedung Nusantara I, Rabu (2/12/15).

Untuk itu, ia ingin melihat bagaima-

na kiat Menristek dalam mencapai target penyerapan anggaran di tahun 2015. Dengan rentang yang masih jauh, tentunya tidak bisa dipaksakan.

Politisi F-Gerindra ini juga menyoroti anggaran di tahun anggaran 2016. Dalam laporan yang dipaparkan Menristek, ia tidak melihat adanya alokasi pos anggaran, sehingga, sulit untuk mengukur target setiap pos anggaran.

“Jika kita bicara anggaran 2016, semua pos penempatan anggaran, harus jelas. Ini terus terang saja, kita kecewa, dalam lampiran laporan yang disampaikan Kemenristekdikti itu, sama sekali kita tidak bisa mengukur setiap pos anggaran. Apa yang dituju, maupun kebijakan yang akan diambil, kita tidak tahu,” geram Sutan.

Soal Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pun tak luput dari sorotan Sutan. Ia berharap, untuk tahun mendatang, UKT jangan seluruhnya dibebankan kepada mahasiswa



Anggota Komisi X Sutan Adil Hendra

dan orang tua. Pasalnya, di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, maka akan cukup memberatkan.

“Untuk itu, Komisi X mengantisipasi, sebelum RKA KL itu berjalan, kita minta penjelasan dari setiap pos pemanfaatan anggaran ini agar tepat guna, tepat sasaran, efektif, dan efisien,”

harap politisi asal dapil Jambi itu.

Kekecewaan pun diungkapkan Anggota Komisi X Sofyan Tan (F-PDI Perjuangan). Ia menilai, penyerapan anggaran untuk program modal, sangat rendah.

“Ini diakibatkan nomenklatur, atau apakah ada penyebab lain? Melihat ini, kami kecewa juga. Anggaran sudah diberikan besar, namun tidak terserap maksimal,” geram politisi asal dapil Sumatera Utara itu.

Sebelumnya, Menristek menjelaskan capaian realisasi APBN 2015 per 30 Nov 2015, sebesar 61,95 persen, atau sebesar Rp27,3 triliun dari total pagu anggaran 2015 sebesar Rp44 triliun. Capaian itu meliputi program Belanja sebesar 89,92 persen, 57,37 persen untuk Barang, Modal sebanyak 29,96 persen, dan Bansos sebesar 97,82 persen.

“Prediksi hingga Desember 2015 sebesar 85,52 persen,” janji Menristek.

(ISF) FOTO: JAKA/PARLE/IW

SOAL HELIKOPTER AW101, KASAU TIDAK PERLU NGOTOT



Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra meminta Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Supriatna tidak ngotot dalam pengadaan pesawat helikopter Agusta Westland AW101. Ia menekankan setiap pengadaan alutsista harus mengede-

pankan transparansi, apalagi terkait penggunaan dana APBN.

“Seharusnya Kasau tidak perlu ngotot untuk membeli heli AW101 dan tidak perlu juga mendiskreditkan PT DI. Dana untuk pembelian itu dari APBN, kalau nanti pemerintah memutuskan menunda atau membatalkan pembelian apakah Kasau juga tetap ngotot,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (2/12/15).

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang masih ingin membicarakan lagi rencana pembelian helikopter VVIP. Keputusan akhir baru dibuat setelah Presiden Joko Widodo kembali dari kunjungan kerja di Paris, Perancis.

Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini menyebut dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen Kemenhan dan Kasau yang dijadwalkan hari ini, masalah ini akan disinggung. Walaupun agenda utama rapat sebenarnya ingin membicarakan soal pemanfaatan lahan Banda Udara Halim Perdana Kusuma yang dikerjasamakan dengan Pihak Swasta/Pihak.

Rencana pembelian heli AW101 menuai polemik lantaran TNI AU dituding mengenyampingkan industri alutsista dalam negeri. Jajaran manajemen PT DI sendiri menyatakan telah mampu merakit helikopter angkut tempur yang juga bisa dirancang menjadi heli kepresidenan.

Heli Super Puma di bawah lisensi Airbus Helicopters yang berpusat di Perancis sebagian proses produksinya dilaksanakan di PT DI dengan lokal konten 20-30 persen. Data menunjukkan heli yang biasa disebut Super Cougar ini telah dipercaya 32 kepala negara sementara AW101 hanya empat kepala negara. (IKY) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/HR

PANSUS HARAPKAN DIRJEN P3L KEMENKES LENGKAPI DATA KORBAN MINOL

Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) menggelar rapat dengar pendapat dengan Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3L) Kemenkes, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos untuk mendapatkan masukan pembahasan RUU Minol Selasa (2/12) di Jakarta.

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Pansus I Gusti Agung Rai Wirajaya, Wakil Ketua Pansus Aryo P.S. Djojohadikusumo mempertanyakan data korban minol di Indonesia. Pasalnya data yang diserahkan kepada DPR adalah data WHO atas jumlah masyarakat dengan gangguan jiwa global akibat minol tahun 2001.

“Kami harap Pansus diberikan data-data terakhir hingga tahun 2015 ini berapa korban minol di Indonesia,” kata Aryo dengan menegaskan, data ini penting dalam penyusunan RUU Minol.

Data dari Dirjen P3L Kemenkes menyebutkan persentase angka kematian di seluruh dunia yang disebabkan tembakau, alkohol dan zat ilegal di negara berkembang dengan kematian tertinggi akibat alkohol sebanyak 2,6 persen. Di negara berkembang dengan angka kematian terendah karena alkohol 8,5 persen.

Sedangkan di negara maju, angka kematian akibat alkohol mencapai 8 persen dan di seluruh dunia sebanyak 3,2 persen. Data WHO tahun 2001 juga menyebutkan, 450 juta orang penderita gangguan jiwa di seluruh dunia, diantaranya terdiri 150 dengan depresi, 90 juta dengan gangguan penggunaan alkohol dan zat adiktif.

Lebih lanjut Ditjen P3L Kemenkes mengatakan, minuman beralkohol tidak bermanfaat bagi kesehatan. Namun alkohol adalah zat yang baik dalam memproduksi obat-obatan. Di masyarakat, alkohol yang beredar ada yang pabrikan dan



Wakil Ketua Pansus Aryo P.S. Djojohadikusumo

ada yang tradisional. “Kalau yang pabrikan termasuk yang impor, jelas standarnya dan bisa dikontrol. Kebanyakan yang beredar di masyarakat yang tradisional dan dipakai dalam upacara adat seperti di Bali dan NTT serta daerah-daerah lain, sulit dikontrol,” katanya.

Terkait banyaknya korban karena minuman keras oplosan, dijelaskan, banyak minuman beralkohol digunakan masyarakat yang minim pengetahuan mengenai bahaya alkohol sehingga mencampur dengan racun serangga atau dioplos methanol dengan spiritus. “Kasus-kasus seperti ini justru harus dilarang dan diedukasi secara luas kepada masyarakat,” ia menambahkan. (MP), FOTO : IWAN ARMANIAS/PARLE/HR



Anggota Komisi XI DPR RI Dony Ahmad Munir

Anggota Komisi XI DPR RI Dony Ahmad Munir menyampaikan apresiasi kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi yang memilih mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung-

LEGISLATOR APRESIASI PILIHAN MUNDUR DIRJEN PAJAK

jawaban karena gagal mencapai target. Menurutnya pilihan mundur seperti ini seharusnya dapat menjadi tradisi yang baik.

“Apa yang dilakukan oleh Pak Sigit, ini tradisi yang baik. Sebagai tanggung jawab moral atas pekerjaannya, beliau rela untuk mengundurkan diri, ketika beliau tidak bisa mencapai target. Saya salut,” puji Dony saat dihubungi di Jakarta, Rabu (2/12/15).

Politisi FPPP ini yakin, Sigit sudah bekerja keras untuk mencapai target. Ia berharap, sikap ini dapat dicontoh

untuk pejabat negara yang lain. Mundurnya pentolan di DJP ini, menjadi bahan evaluasi bagi DJP atas tidak tercapainya target penerimaan pajak.

“Mudah-mudahan tidak ada pejabat mundur lagi, karena target penerimaan pajak tidak tercapai. Harus menjadi evaluasi menyeluruh terhadap rencana target penerimaan pajak, termasuk effort untuk mencapainya. Satu sisi harus realistis, satu sisi juga harus maksimalkan potensi,” kata Dony.

Dengan mundurnya Sigit, lanjut Dony, tentunya Menteri Keuangan

sudah menunjuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt), sehingga dapat meneruskan kinerja dan tugas Dirjen sebelum tahun 2015 berakhir. Termasuk untuk tahun mendatang, apalagi anggaran untuk Dirjen Pajak tahun depan dipatok cukup besar.

“Tahun depan, ada penambahan fasilitas di teknologi informasi, sehingga diharapkan tahun depan akan lebih mudah mencapai target. Pondasinya sudah dibangun di tahun ini. Tahun depan, target harus tercapai. Mundurnya Dirjen ini, jadi cambuk untuk

para pegawai pajak untuk memacu kinerjanya,” imbuh politikus asal dapil Jawa Barat, yang berharap tahun ini penerimaan pajak mencapai lebih dari 80 persen dari target.

Mengutip dari salah satu media cetak nasional, Sigit dilantik menjabat Dirjen Pajak pada Februari 2015, menggantikan Fuad Rahmany, setelah melalui proses seleksi jabatan eselon satu Kemenkeu.

“Pengunduran ini semata-mata sebagai tanggung jawab saya yang tidak berhasil memimpin Dirjen Pajak dalam

mencapai target penerimaan pajak yang dapat ditoleransi (di atas 85 persen,” kata Sigit.

Selama di bawah komando Sigit, Dirjen Pajak telah mengumpulkan penerimaan pajak di luar pajak minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp 806 triliun atau 64,75 persen dari target sebesar Rp 1.244,72 triliun per 27 November 2015. Dengan demikian, ada kekurangan penerimaan sebesar Rp 438 triliun. (SF), FOTO : JAKA NUGRAHA/PARLE/HR

MKD PERIKSA MENTERI ESDM DALAM SIDANG TERBUKA

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) membuat terobosan baru dengan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik secara terbuka. Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pihak pengadu, dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR adalah pihak pertama yang dimintai keterangannya.

“Iya sidang MKD itu pada prinsipnya tertutup tetapi apabila persidangan meminta terbuka, bisa saja itu dilakukan. Prinsipnya kami mencermati kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat sehingga ini tentu menjadi pertimbangan,” kata anggota MKD Darizal Basir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/15).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumbang I ini menyebut pihaknya menyadari harapan masyarakat sangat besar pada penuntasan kasus dugaan

pencautan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR. Ia menekankan MKD dalam proses pemeriksaan hanya fokus pada apakah ada pelanggaran etik. Masalah lain misalnya pidana merupakan ruang bagi kepolisian dan kejaksaan.

Ketika ditanya tentang keterangan yang disampaikan oleh Sudirman Said, politisi Fraksi Demokrat ini berpendapat cukup objektif. “Namun tentu keterangan itu masih perlu kita konfirmasi dengan pihak-pihak terkait lainnya yang akan dipanggil dalam persidangan selanjutnya,” tutur dia.

Sementara itu anggota MKD dari Fraksi Partai Golkar Ridwan Bae masih mempersoalkan legal standing Menteri ESDM sebagai pihak pengadu dalam kasus ini. Ia mengutip pasal 5 Peraturan DPR no.2/2015 yang menjelaskan pihak-



Anggota MKD DPR Darizal Basir

pihak yang berhak melapor ke MKD.

“Tidak diatur pejabat eksekutif dalam hal ini Menteri ESDM mengadukan pejabat legislatif. Jadi ada persoalan dalam persidangan sehingga Sudirman Said belum berhak menyampaikan keterangan,” tandas dia. (IKYI)/FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/HR



Anggota Pansus Pelindo II M. Nizar Zahro

PELINDO III LEBIH TAAT HUKUM

Dibandingkan dengan Pelindo II, ternyata Pelindo III lebih taat hukum. UU No.17/2008 tentang Pelayaran dipatuhi, sehingga posisinya hanya sebagai operator, bukan regulator. Kontrak konsesi juga selalu diupayakan merujuk pada UU Pelayaran.

Anggota Pansus Pelindo II M. Nizar Zahro (F-Gerindra) menyatakan hal tersebut di Surabaya, Senin (30/11). Menurutnya ada tiga poin penting yang

membedakan antara Pelindo II dan III. Selain taat hukum, Pelindo III lebih terbuka dalam pengelolaan. Dan poin penting lainnya adalah, Pelindo III memberdayakan putra putri bangsa sendiri dalam pengelolaan Pelabuhan Teluk Lamong, Jawa Timur.

Pelabuhan Teluk Lamong, sahamnya dikuasai 100 persen oleh Pelindo III. Tak ada keterlibatan asing di dalamnya. Dalam hal nilai buku, lanjut Nizar, Pe-

lindo III ternyata lebih banyak menguntungan secara finansial dibandingkan Pelindo II. Walau *market share*-nya kecil, tapi nilai bukunya lebih tinggi. *Market share* Pelindo III hanya 15 persen. Sedangkan Pelindo II 65 persen. Ini menjadi bahan masukan penting bagi Pansus.

“Semestinya Pelindo II wajib mencon-

toh Pelindo III. Teknologi yang dipakai di Teluk Lamong itu terancang ketiga setelah Amerika dan Spanyol. Pelindo II mestinya membangun new port Kalibaru juga dengan teknologi ini,” ucap Nizar, seraya menambahkan, “Penerapan teknologi di Teluk Lamong, membuat pelabuhan tidak bising dan tidak perlu banyak orang di lapangan sebagai ope-

rator.”

Dengan penerapan teknologi canggih di Pelabuhan Teluk Lamong, *dwelling time* juga diupayakan jauh lebih singkat. Dan ketika Pansus Pelindo II DPR meninjau langsung Teluk Lamong, terlihat lebih rapi, bersih, dan tidak bising. (MH),

FOTO : M. HUSEIN/PARLE/HR

SETJEN DPR BERBAGI ILMU DENGAN SETJEN SENAT KAMBOJA



Deputi Administrasi Setjen DPR Achmad Djuned didampingi para pejabat Setjen DPR menerima Setjen Senat Kamboja

Sekretariat Jenderal DPR RI kedatangan 9 delegasi dari Sekretariat Jenderal Senat Kamboja. Kunjungan dalam rangka studi banding itu pun disambut baik Setjen DPR RI, dengan membagi ilmu dalam organisasi Ke-

setjenan DPR RI.

Sesi pertama, diskusi dipimpin oleh Deputi Administrasi Setjen DPR, Achmad Djuned. Djuned memperkenalkan segenap jajaran pejabat dan tugas masing-masing pejabat, diantaranya

Inspektur Utama Setjen DPR RI, Setyanta Nugraha dan Deputi Persidangan, Damayanti.

Pertemuan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama Djuned, dengan didampingi Kepala Biro Umum, Mardian Umar. Mantan Wakil Sekjen DPR itu menjelaskan tentang struktur organisasi Setjen DPR, serta informasi tentang kepegawaian. Tak ketinggalan, informasi mengenai formasi staf PNS dan non-PNS pun turut disampaikan.

Delegasi Setjen Senat Kamboja dipimpin oleh Director of Information, Chuon Na. Dengan didampingi oleh Sok Socheat, Tonn Kunthou, Vann Nary, Phav Chanmatin, Un Sotheara, Kham Kolap, Luch Likanan, dan Sous Sovannrith.

Usai sesi diskusi, dilanjutkan dengan tour building, yakni peninjauan museum DPR RI dan Ruang Paripurna, di Gedung Nusantara. Salah satu delegasi mengungkapkan kekagumannya terhadap kondisi museum yang representative. (SF), FOTO : JAKA NUGRAHA/PARLE/HR

PELINDO III BISA JADI CONTOH SEMUA PELINDO

PT. Pelindo III bisa jadi contoh yang baik bagi semua Pelindo, baik I, II, dan IV, dalam mengelola sistem kepelabuhanan. Dari penggunaan teknologi canggih hingga penerapan *green terminal* patut diapresiasi.

“Saya kira semua perusahaan pelindo yang ada di Indonesia ini harus mencontoh apa yang dilakukan Pelindo III ini. Penerapan teknologi di sini diharapkan

bisa digunakan di semua pelabuhan Indonesia.” Demikian pernyataan Anggota Pansus Pelindo II DPR Irmawan di Surabaya saat meninjau langsung PT Pelindo III, Senin (30/11).

Kunjungan Pansus Pelindo II ke Pelindo III tersebut ingin mengetahui sejauh mana sistem pengelolaan pelabuhan yang dilakukan Pelindo III. Di Jatim, Pelindo III mengelola Pelabuhan Tanjung



Anggota Pansus Pelindo II DPR Irmawan

Perak dan Pelabuhan Teluk Lamong. Ada perbedaan yang mencolok dan signifikan antara Pelindo II dan III. Selain peralatan canggih dan *green terminal*, Pelindo III juga lebih terbuka dalam mengelola sistem kerja.

Menurut Irmawan, bila dibandingkan dengan Pelindo II, Pelindo III jauh lebih

baik. "Peralatannya sudah sangat canggih, yang belum pernah digunakan di pelabuhan lain," ungkap politisi PKB tersebut. Dengan melihat fakta perbandingan ini, lanjut Irmawan, Pelindo II mesti segera membenahi manajemennya. Pelindo III sudah melakukan hal yang luar biasa.

Dirut Pelindo III Djarwo Surjanto, nilai Irmawan, menerapkan keterbukaan dalam memimpin perusahaannya. Sang dirut juga dekat dengan dewan direksi lainnya. Sehingga setiap mengambil keputusan, dia selalu mendapat dukungan yang solid. (MH), FOTO : M. HUSEIN/ PARLE/HR

II FPG Berbagi Kasih Dengan Lansia BPSTW Ciparay, Bandung



Ketua Ikatan Isteri Fraksi Partai Golkar (IIFPG) DPR RI mengunjungi Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) Ciparay Bandung

Setiap manusia hidup pasti akan mengalami tua. Oleh karena itu janganlah menyianyikan dan menelantarkan orangtua kita. Hal itu menjadi salah satu pesan moral yang disampaikan oleh Ketua Ikatan Isteri Fraksi Partai Golkar (IIFPG) DPR RI saat mengunjungi Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) Ciparay Bandung, Selasa (1/12)

"Sebenarnya ini merupakan bagian dari program bulanan kami, kebetulan juga di bulan Desember ini juga dipe-

ringati hari ibu, oleh karena itu kali ini kami memilih mengunjungi BPSTW. Karena menurut kami masa tua merupakan masa yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari anak-anak dan semuanya. Dan kami datang untuk berbagi kebahagiaan dan berbagi kasih kepada aki-aki dan nini-nini di sini," ungkap Neti Ade Komarudin selaku Ketua IIFPG.

Neti mengapresiasi fasilitas dan kondisi yang ada di BPSTW ini yang sengaja dibuat senyaman mungkin

untuk penghuni Balai yang notabene merupakan para lanjut usia. Sehingga para lansia merasa seperti berada di tengah-tengah keluarga dan rumah sendiri. Tidak hanya itu keramahan para petugas menjadi kunci utama dalam pengelolaan balai ini.

Ditambahkan Ketua panitia bakti sosial ini, Leti Roem Kono, dalam kesempatan itu pihaknya juga membawakan sejumlah barang yang memang sangat dibutuhkan oleh para penghuni panti. Misalnya seperti kursi roda, televisi, jam dinding, dispenser, selimut, popok untuk orang lanjut usia, serta makanan ringan.

Sebagai tanda terimakasih, para lanjut usia memberikan hadiah bagi anggota IIFPG, yakni berupa nyanyian. Pada kesempatan itu IIFPG juga melengkapi kebahagiaan penghuni balai dengan bernyanyi dan berjoget bersama. Melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah para penghuni balai, Leti berharap acara seperti ini dapat terus digelar.

Lebih dari itu Neti dan Leti berharap agar komisi VIII yang merupakan mitra kerja Kementerian sosial, untuk mampu mendorong pemerintah melalui kementerian tersebut menambah panti sosial lanjut usia itu di semua kota. Keduanya meyakini masih banyak orangtua atau lanjut usia di kota-kota lain yang terlantar dan butuh penanganan seperti di BPSTW itu. (AYU) FOTO:RY/PARLE/RAY

PANJA KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL DPR DESAK PEMERINTAH LAKSANAKAN REKOMENDASI

Panitia Kerja (Panja) Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan Nasional Komisi V DPR menyampaikan sejumlah hasil rekomendasi dari hasil kerja Panja kepada pemerintah dan mendesak Pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasi yang sudah Panja sampaikan.

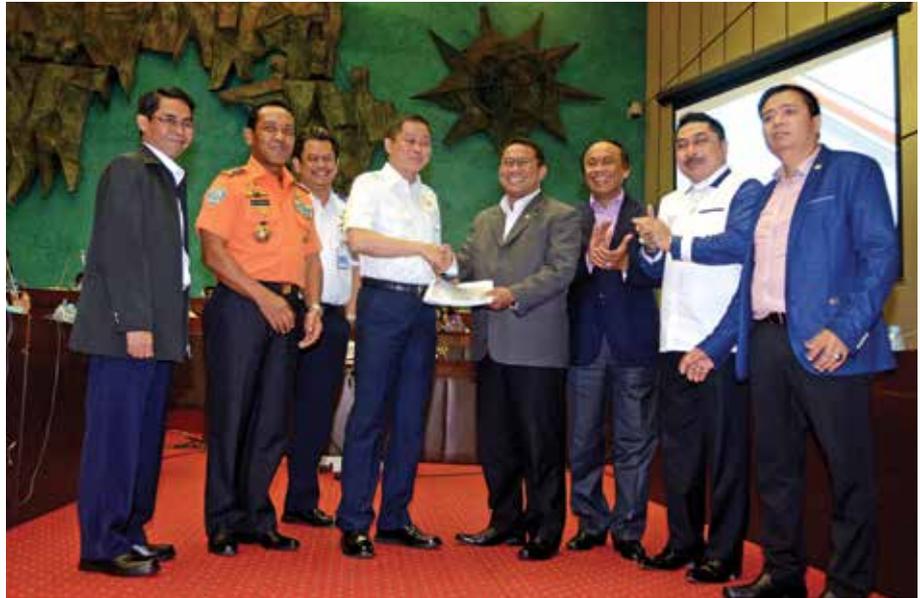
Di dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Kepala Basarnas, BMKG, Angkasa Pura I dan II, serta jajaran Direksi Maskapai Penerbangan Nasional, Senin (30/11) tersebut, Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis menyampaikan beberapa rekomendasi terkait hasil kerja Panja Keselamatan Penerbangan, diantaranya, Komisi V DPR mendesak pemerintah melaksanakan seluruh peraturan tentang penerbangan.

Pada kesempatan tersebut, Fary juga mengatakan bahwa pihaknya mendesak pemerintah untuk benar-benar menegakkan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi pada dunia penerbangan di republik tercinta ini. “Komisi V juga mendesak pemerintah melakukan penegakkan hukum kepada pemerintah dan pelaku penyedia jasa penerbangan,” jelasnya.

Selanjutnya, rekomendasi Panja mendesak agar seluruh operator penerbangan taat dalam memberikan pelatihan kepada awak pesawat baik secara rutin. “Operator didesak melakukan program training pilot yang berkualitas dan berkompentensi. Pemerintah kami desak untuk memeriksa kesehatan crew penerbangan. Operator juga kita desak untuk melakukan pendidikan cross culture bagi pilot asing,” ujarnya.

Sementara itu, dihadapan wartawan, usai raker, Fary berkesempatan menjelaskan, bahwa Panja ini telah bekerja selama sepuluh bulan, dan dalam rekomendasi tersebut Panja memberikan beberapa poin penting baik bagi pemerintah, dalam hal ini Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Udara, ke navigasian, BMKG, Basarnas dan rekomendasi kepada operator maskapai penerbangan.

“Paling tidak, secara singkat kami dari Panja menginginkan, dengan adanya rambu-rambu yang sudah kita berikan dalam rekomendasi ini, kami juga meminta untuk melakukan audit terhadap bandara-bandara termasuk sertifikasi



Raker Panja Keselamatan Penerbangan Nasional Komisi V DPR dengan Menhub, Basarnas dan BMKG

yang dijalankan disesuaikan dengan amanat UU Penerbangan, yang bisa dilaksanakan oleh semua komponen yang terlibat dalam pelayanan penerbangan kita,”terangnya.

Ia menambahkan, jika semua rekomendasi ini bisa dilaksanakan oleh semua komponen yang terlibat, dan sepakat, maka satu bulan kemudian bisa dilakukan rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perhubungan Udara dengan semua stakeholder.

“Rapat nanti akan dilihat, rekomendasi yang telah kita berikan mana yang sudah dilaksanakan, mana yang sedang dilaksanakan dan mana yang belum untuk kita kawal,” kata Fary.

Lalu, lanjut Fary, nantinya Panja akan meminta roadmap yang berkaitan dengan perbaikan dalam rangka keselamatan, keamanan penerbangan yang akan dikawal juga.

Dalam poin lain yang disampaikan lainnya, ujar Fary, Panja juga meminta kepada semua komponen baik dari Kemenhub, BMKG, Basarnas, Angkasa Pura, dan maskapai penerbangan, untuk bersungguh-sungguh dalam rangka

memperbaiki pelayanan.

“Kita semua harus bekerja sama untuk melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan, karena semua milik kita bersama dalam rangka perbaikan penerbangan kita,” tegasnya.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengapresiasi rekomendasi yang sudah dihasilkan dan dikerjakan oleh Panja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan Nasional Komisi V DPR.

“Nanti kita akan membuat roadmap-nya, sebagian (rekomendasi-red) sudah dilaksanakan dan sebagian lagi sedang dikerjakan, dan yang belum akan kita follow up,” kata Jonan.

Ia berharap, bahwa tentunya ini semua meminta kerja sama dari semua stakeholder, termasuk operator penerbangan Bandar udara, navigasi udara, dan juga masyarakat secara luas.

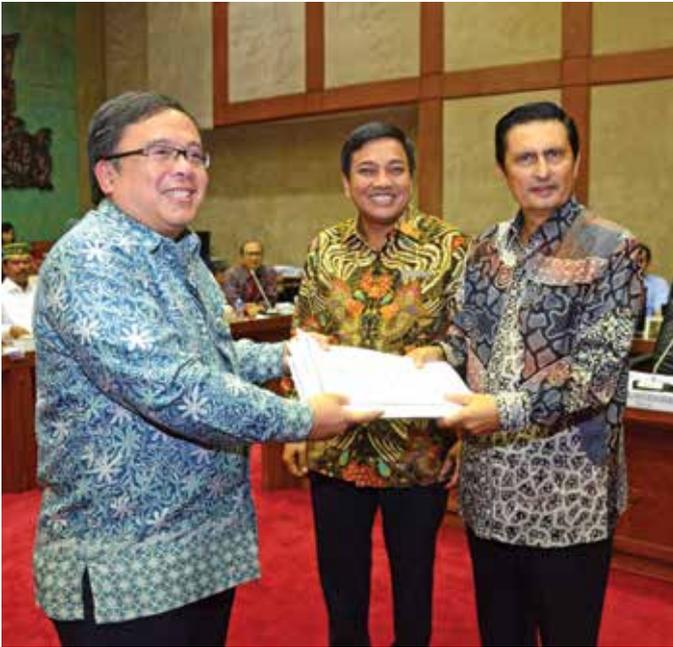
“Pada prinsipnya, ini semua sesuai dengan amanah UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, kita akan laksanakan dengan sepenuh-penuhnya,” tegas Jonan mengakhiri. (NT), FOTO : RISKA ARININDYA/PARLE/HR

DPR dan Pemerintah Lanjutkan Pembahasan RUU JPSK

Komisi XI DPR dan Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Keuangan, sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK). Hal ini disepakati usai Komisi XI menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke-

pada Menteri Keuangan, Bambang PS. Brodjonegoro.

Ketua Komisi XI Fadel Muhammad menyatakan, sebanyak 315 pasal masih terdapat masalah substansif, 70 pasal tetap, dan 23 pasal redaksional yang berubah. Nantinya, pembahasan tidak akan dilakukan secara rinci dari satu pasal ke



Ketua Komisi XI Fadel Muhammad menyerahkan DIM RUU JPSK kepada Menkeu

pasal lainnya, namun kedua pihak sepakat untuk membagi pasal-pasal tersebut ke dalam beberapa kluster.

“Totalnya DIM 409 pasal. Kita juga membuat kompilasi dari keseluruhan DIM, juga sudah dibuat kluster-kluster. Di tiap kluster akan kita lihat permasalahannya,” kata Fadel, usai rapat, di Gedung Nusantara I, Senin (30/11/15).

Politisi Golkar itu mengatakan, kluster yang cukup menjadi perhatian oleh fraksi-fraksi DPR maupun Pemerintah adalah kluster pengambilan penanggung jawab terakhir, dan wewenang dan tanggung jawab ketika terjadi krisis, terutama jika ada keuangan negara dan diperlukan dana talangan atau *bailout*.

“Yang paling menggembirakan adalah, ke empat instansi lembaga ini (Kemenkeu, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan) sudah menyatukan pandangan. Kalau ini sudah sama, ini akan lebih cepat menyelesaikannya. Kita usahakan masa sidang ini selesai,” janji politisi asal dapil Gorontalo itu.

Hal senada pun diungkapkan Menkeu. Pihaknya sudah menerima DIM dari Komisi XI DPR, dan sepakat melanjutkan pembahasan RUU JPSK. Ia juga menyatakan, pembahasan akan dibagi per cluster.

“Karena intinya pembahasan DIM adalah pasal per pasal, kami tentunya tetap menjaga gambaran besar dari isu-isu RUU ini, maka disepakati Komisi XI dan Pemerintah, pembahasan RUU JPSK ini akan dibahas berdasarkan *cluster*. Contohnya, bukan membicarakan pasal per pasal, tapi lebih kepada pembagian tugas antar lembaga,” kata Menkeu.

Menkeu menambahkan, jika nanti DPR dan Pemerintah sepakat, pasal yang terkait dengan hubungan antar lembaga itu akan diperbaiki, jika perlu dilakukan perbaikan. Atau, jika dianggap sepakat semua sama, maka akan tetap.

“Contohnya, mengenai bank bermasalah, itu kita bahas sebagai 1 kluster. Jika sudah sepakat, itu yang akan diterjemahkan dalam revisi pasal, kalau pasal juga harus berubah. Itu yang dimaksud dengan pembahasan per *cluster*, sehingga tidak kehilangan gambar besarnya, tidak terjebak pada kata-kata dalam pasal,” imbuh Menkeu.

Menkeu memastikan, pembahasan akan mementingkan substansi, sehingga tidak akan ada permasalahan yang ketinggalan. Salah satunya, ketika keputusan melibatkan uang negara, memang perlu dipikirkan siapa yang akan mengambil keputusan.

Keduanya berharap pembahasan RUU ini dapat diselesaikan sebelum masa sidang ini selesai, pada 18 Desember mendatang. (SF), FOTO : JAKA NUGRAHA/PARLE/HR

PANSUS PELINDO II TEMUKAN POTENSI KERUGIAN NEGARA DAN PELANGGARAN UU

Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR terus mendalami beberapa temuan-temuan berkaitan dengan beberapa kasus di PT. Pelindo II. Pansus menemukan potensi kerugian negara dan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Anggota Pansus Pelindo II Masinton Pasaribu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menjelaskan beberapa temuan-temuan berkaitan dengan beberapa kasus di Pelindo II, antara lain kasus pertama mengenai kasus pengadaan barang dan jasa yaitu 10 unit mobil crane dan 3 unit Quay Container Crane (QCC), serta pengadaan IT.

Selain itu, berkaitan dengan Perpanjangan kontrak pengelolaan terminal peti kemas yaitu yang dikerjasamakan anak perusahaan PT.Pelindo II dengan perusahaan Hongkong. Selanjutnya masalah pengelolaan Terminal Peti Kemas Koja dan berkaitan dengan pembangunan pelabuhan baru (Neo Priok) dengan pinjaman utang dengan Global Bond yang dibiayai oleh sindikasi bank internasional.



Anggota Pansus Pelindo II Masinton Pasaribu

Masinton mengutarakan bahwa Pansus sedang mendalami perpanjangan kontrak pengelolaan peti kemas di Priok antara anak perusahaan PT. Jakarta International Container Terminal (PT. JICT) dengan perusahaan Hongkong HPH, yang berpotensi negara dirugikan lebih dari Rp.20 Triliun.

“Potensi kerugian negara yang sangat besar, berkaitan juga bagaimana Pansus ini bisa mengembalikan aset pelabuhan yang telah digadaikan pada asing itu,” katanya, Selasa dini hari (1/12), usai Rapat Konsinyering, di Jakarta.

Pansus juga sedang mendalami adanya unsur pelanggaran Undang Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. “UU tentang Pelayaran mengamanatkan pengelolaan pelabuhan itu harus mendapatkan ijin konsesi dari regulator dalam hal ini pemerintah yang diwakili Menteri Perhubungan,” ungkapnya.

Termasuk pelanggaran UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkaitan dengan tata kelola BUMN yang benar. Menurut Masinton, Pansus akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tata kelola BUMN dengan dasar pembentukan BUMN adalah implementasi dari pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yakni cabang-cabang produksi yang berkaitan dengan rakyat banyak dikuasai negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

an rakyat.

“Pansus ini juga menginvestigasi bagaimana tata kelola BUMN pada secara keseluruhan. Pelindo II hanya sebagai modus saja. Pintu masuk kita, bahwa tata kelola seperti ini model tata kelola yang tidak benar, seperti banyak *mismatch*, korupsi, dan lain lain juga terjadi di BUMN-BUMN Indonesia secara keseluruhan,” paparnya.

Untuk itu Pansus juga akan meminta pertanggungjawaban baik itu kepada pemerintah dalam hal ini Menteri atau Direktur Utama PT. Pelindo II. Karena ini berkaitan adanya ijin prinsip yang diberikan oleh Menteri BUMN kepada Dirut Pelindo II untuk melakukan perpanjangan kontrak itu.

“Kita akan memanggil Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN dari pihak pemerintah. Kemudian juga akan memanggil Dirut Pelindo II. Pansus juga sudah memanggil Dirut PT.JICT,” tegasnya.

Masinton menambahkan, Pansus Pelindo II akan melaporkan hasil kerja sebelum penutupan masa sidang tanggal 18 Desember 2015. Pansus akan ada kesimpulan yang nanti berkaitan dengan perpanjangan kontrak PT. JICT yang selama ini sudah dialami, serta selesai masa persidangan ini juga akan melanjutkan lagi mendalami tentang Neo Priok.

(AS) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

PARLEMEN PAKISTAN STUDI BANDING KE DPR

Komisi I DPR RI menerima kunjungan studi banding Parlemen Pakistan. Agenda utama kunjungan ini adalah mempererat hubungan parlemen kedua negara sekaligus ingin belajar tentang dinamika demokrasi yang berlangsung di Indonesia, negara yang sama-sama memiliki penduduk muslim terbesar.

“Kami menyambut keinginan Parlemen Pakistan untuk bekerja sama lebih konkrit, terutama di bidang pengembangan demokrasi karena Indonesia sebagai negara yang sama-sama berpenduduk mayoritas muslim telah konsisten berdemokrasi selama 17 tahun,” kata Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais usai pertemuan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/11/15).

Politisi dari Fraksi PAN ini juga menyambut baik dukungan Parlemen Pakistan agar Indonesia bisa berperan lebih besar di dunia Islam terutama dalam Organisasi Konferensi Islam

(OKI). Menurutnya hal ini akan disampaikan kepada pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah. DPR sendiri tentu juga akan memainkan peran sesuai porsinya, diplomasi parlemen.

Hanafi dalam kesempatan itu juga memaparkan tentang politik bebas dan aktif yang dianut Indonesia, alatnya pembahasan APBN di DPR, permasalahan alutsista dan ketegangan yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan.

Ketua delegasi Parlemen Pakistan Naeem Aslam dalam pertemuan tersebut juga memaparkan kesulitan negerinya menghadapi isu terorisme yang menurutnya berkembang pasca berakhirnya perang Afganistan. Ia menekankan keterlibatan negara-negara barat mendukung Taliban berperang melawan Rusia pada akhirnya berimbas pada Pakistan negara tetangga Afganistan.

Naeem Aslam menjelaskan negaranya



Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais

harus membayar mahal karena dampak dari sengkaret perang Afganistan, memunculkan aksi terorisme sampai pada pergerakan kelompok bersenjata ISIS. Pakistan paparnya kerepotan dengan sejumlah operasi militer menangkalkan pergerakan terorisme termasuk upaya deradikalisasi membenahi regulasi terkait madrasah di negara tersebut. (IKY)

FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

KOMISI VII TANYAKAN LEGAL STANDING SKK MIGAS

Komisi VII DPR RI mempertanyakan terkait *legal standing* dari SKK Migas. Hal ini ditanyakan supaya jangan sampai kalau ada masalah SKK Migas tidak pada posisi yang dikalahkan.

Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha mengatakan, kalau SKK Migas tidak melakukannya yang dikhawatirkan dalam kurun waktu ke depan, ketika ada permasalahan tidak



Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha

pada posisi sekuat jika sudah dimasukkan sebagai institusi yang baru.

“Apakah namanya semua sudah diubah. Evolusinya dari Pertamina, BP Migas, ke SKK Migas. Yaitu bagaimana bu-

nyinya. Kenapa tidak langsung diubah, memang ada kesulitan. Kesulitan apa mengubah kontrak-kontrak yang lama menjadi SKK Migas?,” ungkap Satya Yudha, saat RDP dengan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Senin (30/09/2015), di Gedung DPR, Jakarta.

Ketua Komisi VII Kardaya Warnika mengatakan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Bumi, di pasal peralihan sudah mengamanatkan bahwa dari Pertamina ke BP Migas harus segera diubah, UU itu juga berlaku dari BP Migas ke SKK Migas.

“Kalau tidak dikhawatirkan bahwa *legal standing* SKK Migas memberikan persetujuan menjadi tidak ada dasarnya karena hanya berdasarkan kontrak,” paparnya.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, menyampaikan bahwa mengenai *legal standing* untuk PSI belum diubah, jadi untuk kontrak-kontrak yang baru sudah ditandatangani atau perpanjangan ditandatangani dengan nama SKK Migas, tapi kontrak-kontrak sebelumnya belum diubah.

“Ini belum dijalankan jadi kami catat nanti akan kami jalankan,” katanya. (ASI, FOTO : ANDRI/PARLE/HR)

PANSUS PELINDO II GALI PERBANDINGAN DI PELINDO III



Wakil Ketua Pansus Teguh Juwarno dengan Dirut Pelindo III

Pansus Angket Pelindo II DPR menggali banyak informasi sebagai bahan perbandingan antara Pelindo II dan III. Pelindo III ternyata jauh lebih baik daripada Pelindo II.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Pansus Pelindo II yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Teguh Juwarno dengan Dirut Pelindo III Djarwo Surjanto di Surabaya, Senin (30/11).

Djarwo menyatakan, Pelindo III kini paling canggih di ASEAN dalam penggunaan teknologi peralatan.

Kini, lanjut Djarwo, Pelindo III sudah menggunakan *crane* otomatis tanpa awak dalam mengoperasikannya. Operasi *crane* sepenuhnya dikendalikan dari ruang kontrol khusus. Peralatan canggih itu dibeli dari Finlandia, Australia, dan Perancis.

Hal yang juga penting dari keunggulan Pelindo III, pelabuhan ini sudah dioperasikan tanpa keterlibatan perusahaan asing. “Kami sedang dalam proses berubah. Perubahan itu *step by step*,” ujar Djarwo.

Teguh Juwarno sendiri mengakui, Pelindo III adalah *base-mark* sebagai pengelola pelabuhan. Bahkan, Anggota Pansus I Putu Sudiartana (F-PD) dalam pertemuan tersebut, menegaskan, Dirut Pelindo III lebih memiliki hati daripada Dirut Pelindo II. Sang Dirut Pelindo III, kata Putu, lebih ramah dan sederhana.

Ditambahkan Djarwo, soal pemberdayaan tenaga kerja, Pelindo III sudah mengangkat pekerja *outsourcing* sebagai pekerja tetap. Tak ada lagi pekerja *outsourcing* di Pelindo III yang kini sedang berulang tahun ke-23. Kecuali petugas keamanan dan pekerja ahli yang tidak menjadi pekerja tetap

(MH), FOTO : M. HUSEIN/PARLE/HR

PERLU KEHATI-HATIAN JALANKAN TUGAS

Sekretariat Jenderal DPR, sebagai bagian dari *supporting system* Anggota Dewan, diharapkan untuk berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan. Apalagi dengan ritme dan tuntutan pekerjaan yang semakin meningkat, untuk

senantiasa meningkatkan kompetensi.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPR, Winantuningtyastiti, usai melantik 12 Pejabat Eselon II Setjen DPR, di Gedung Pustaka Loka, Jumat (27/11/15) malam. Win, panggilan akrab

orang nomor satu di Setjen DPR itu, didampingi Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk, dan dihadiri Pejabat Eselon I hingga IV.

“Sekarang ini, tuntutan dari Dewan luar biasa, sehingga tugas dan fungsi

harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan konsekuensi dari *supporting system*. Jika Dewan menghadapi permasalahan, Kesetjengan tidak boleh jauh,” kata Win, usai acara.

Win juga mengingatkan kepada segenap pejabat, bahwa saat ini DPR sedang menjadi sorotan. Seperti target legislasi yang tidak terpenuhi, dan sebagainya. Hal ini pun berimbas kepada Kesetjengan, yang mendapatkan tantangan.

“Dengan adanya struktur organisasi yang baru di lingkungan Setjen DPR, harus dilakukan perubahan-perubahan dan pembenahan, sembari meningkatkan kompetensi SDM untuk menghadapi berbagai tantangan,” imbuh Win.

Ia juga berharap kepada seluruh pejabat DPR untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan tidak memperkeruh suasana. Informasi penting harus diamankan, sehingga jangan sampai ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkannya.

“Jangan menyampaikan tanggapan yang merugikan DPR, dan jangan bersikap yang mencuri perhatian DPR. Lebih baik diam, daripada bicara yang memperkeruh suasana. Terus tingkatkan kompetensi juga terus untuk mendukung Anggota Dewan,” pesan Win.

Walaupun saat ini Kesetjengan DPR sedang menjalani masa transformasi, lanjut Win, dengan intensitas pekerjaan di Setjen cukup tinggi, namun tidak boleh ada kekosongan jabatan. Ia memastikan, sebagian posisi jabatan



Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti

sudah memiliki pejabat, dan sebagian lagi dalam proses lelang jabatan.

Satyanto Priambodo, salah satu pejabat yang dilantik mengatakan, saat ini Setjen DPR dalam masa transformasi, yang berimbas kepada intensitas pekerjaan yang semakin berat. Sehingga, seluruh pejabat diminta untuk berlari kencang.

“Ini merupakan titik awal struktur organisasi yang baru. Ini transformasi yang harus dijalankan bersama-sama oleh seluruh pejabat DPR RI. Termasuk dalam persiapan menuju Parlemen Modern,” kata pejabat yang dilantik

menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan itu.

Nanang, panggilan akrab Satyanto menyatakan, struktur organisasi Setjen DPR diciptakan tanpa bisa bekerja sendirian, sehingga harus bekerja bersama-sama. Sehingga diperlukan kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian dalam bertindak.

“DPR sangat rentan terhadap isu, sehingga harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai, jika ini kesalahan pendukung dewan yang salah mengambil keputusan, tapi terkesan Dewan yang salah,” imbuh Nanang.

Pejabat lain dilantik meliputi Rahaju Setya Wardani yang dilantik menjadi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Mardian Umar dilantik menjadi Kepala Biro Umum, Bambang Rudy Anto menjadi Inspektur II, dan Makmur bertugas sebagai Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara.

Berikutnya, Nunu Nugraha Khuswara menjadi Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Juliasih sebagai Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Dewi Barliana dilantik menjadi Inspektur I, dan Helmizar ditugaskan menjabat Kepala Biro Persidangan I.

Kemudian, Dempo Awang Yuddie dipercaya menjabat Kepala Biro Protokol, Dimiyati Sudja dilantik menjadi Kepala Biro Persidangan II, dan Kepala Biro Kesekretariaan Pimpinan dijabat Yohannes O.I Tahapari. (SFI/FOTO:DENUS/PARLE/HR

REFORMASI KESETJENAN DPR BUKAN BASA-BASI

Penataan organisasi Sekretariat Jenderal-Setjen DPR RI bertujuan meningkatkan kinerja dalam mengemban tugas layanan dan dukungan kepada anggota dewan. Langkah reformasi yang juga dilaksanakan oleh anggota Korpri (Korps Pegawai RI) Unit Setjen DPR tersebut bukan kebijakan basa-basi dan bukan pula untuk mempertahankan agenda *business as usual*.

“Tentu kita memperhatikan amanat dari Presiden RI dalam hal ini selaku Penasihat Nasional Korpri yang meminta percepatan reformasi birokrasi

di semua tingkatan dan tidak terjebak *business as usual*. Salah satu langkah reformasi kita adalah menguatkan pengawasan internal dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara organisasi. Jadi kita sudah memiliki Inspektorat Utama dulu setingkat eselon tiga sekarang sudah eselon satu,” kata Setyanta Nugraha, Inspektur Utama Setjen DPR usai upacara bendara dalam rangka HUT Korpri ke 44 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/11/15).

Ia juga mengingatkan Korpri saat ini



Inspektur Utama Setjen DPR Setyanta Nugraha

bukan lagi menjadi sekedar paguyuban bagi PNS tetap telah menjadi organisasi profesi yang menuntut profesionalitas.

Untuk meningkatkan layanan dan transparansi anggota Korpri sesuai arahan presiden harus menjadi yang terdepan dalam penerapan teknologi informasi.

Upacara bendera dalam rangka HUT Korpri diikuti oleh pegawai tiga kesetiaan yaitu MPR, DPR dan DPD yang juga tercatat sebagai anggota Korpri. Bertindak selaku Pembina Upacara, Sekjen DPD RI Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto yang dalam

kesempatan itu membacakan sambutan Presiden Joko Widodo.

Dalam sambutan tertulisnya presiden meminta anggota Korpri mencermati lima amanat yaitu, melakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan, membangun mentalitas baru yang positif, yang berintegritas, yang memiliki etos kerja, dan yang berjiwa gotong royong dan mempersiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif

dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Sedangkan dua amanat lainnya adalah menjaga netralitas anggota Korpri dalam pesta demokrasi, khususnya Pemilu Kepala Daerah yang akan digelar akhir tahun ini. Presiden juga meminta semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktifitas nasional dan daya saing bangsa. (IKY/

FOTO: JAKA/PARLE/HR

Komisi VII Himpun Masukan Revisi UU Migas ke Kaltim



Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR dipimpin Tamsil Linrung melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan

Dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2015-2016 Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR yang dipimpin Tamsil Linrung serta didampingi 9 (sembilan) orang Anggota Dewan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur dan langsung diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan, Kamis (27/11).

Seusai diterima Pemkot Balikpapan tim kunker Komisi VII DPR RI mengadakan pertemuan dengan Direksi PT. Pertamina (Persero) Balikpapan, Para Bupati Daerah Penghasil Migas, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kadis Pertambangan, Lingkungan, Kehutanan, PT PGN (persero) Tbk, Akademisi Univ. Mulawarman.

Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi VII DPR, Tamsil Linrung dalam pertemuan ini menyampaikan, kunjungannya ke

Provinsi Kalimantan Timur ini dalam rangka menyerap aspirasi dan mendingar masukan serta ingin mengetahui kendala-kendala terkait dengan revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

“Dalam melakukan revisi ada beberapa hal yang spesifik dan ingin diketahui baik dari hulu maupun dari hilir mengenai keluhan daerah tentang dana bagi hasil dan proses-proses perijinan serta berinvestasi. Kami akan memberikan dukungan sebagai suatu instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tutur Tamsil.

Lebih lanjut Tamsil mengatakan, saat kunjungan kerja ke beberapa daerah, pihaknya bertemu dengan beberapa investor luar negeri yang mengeluhkan proses perijinan dalam berinvestasi. “Dengan semangat baru kita ingin

jalankan ini. Mereka mengharapkan melalui revisi ini ada ruang untuk kemudahan berinvestasi,” kata politisi PKS ini.

Kepala Dinas Pertambangan Pemprov. Kaltim menanggapi hal itu mengharapkan, pemda penghasil migas hendaknya selalu diikutsertakan dalam pertemuan *good plain and budgeting* yaitu rencana anggaran karena baginya sangat penting untuk mengetahui dan memperkirakan penerimaan perimbangan bagi hasil berdasarkan rencana K3S tersebut itu.

Pihaknya juga menginginkan supaya dapat dilibatkan dalam *good plain and budgeting* sebagaimana di perusahaan pertambangan batu bara, termasuk rencana produksi mereka serta biaya-biaya yang dikeluarkan baik untuk kegiatan-kegiatan sosial. Selain itu, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memonitoring dan rekomendasi perbaikan pengelolaan CSR yang dilakukan oleh K3S.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 Perusahaan Migas, Pengawasan Bahan Bahan Bakar maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengawasi dan memonitor penggunaan bahan bakar minyak baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi ke konsumen, sektor pertambangan, perkebunan, hutan dan lain-lain. Sebab ada dugaan pelaporan penjualan BBM khususnya BBM dan subsidi tidak dilakukan oleh badan usaha dan sehingga perlu diadakan pengecekan. Mereka juga berharap diberikan wewenang untuk menerbitkan surat keterangan perusahaan jasa peminjam untuk kegiatan migas, sebab selama ini dilakukan di pemerintah pusat.

Sementara itu, Wakil Bupati Penajam Paser Utara Mustakim mengharapkan, daerah penghasil itu hendaknya diberikan dana bagi hasil yang proporsional. Artinya, antar daerah penghasil itu diberikan bagian beda-beda tipis dengan menganalogikan, kalau sebuah perusahaan yang karyawannya produktif gajinya tidak sama dengan karyawan yang tidak produktif.

Karena itu, setidaknya dalam revisi

UU No. 22 Tahun 2001, daerah penghasil diberikan lebih besar sehingga dapat mempercepat proses pembangunan daerah. "Daerah-daerah Kabupaten itu pada umumnya infrastruktur pasti kurang, dibanding daerah perkotaan, sehingga kami perlu dana untuk pembangunan infrastruktur untuk suksesnya pembangunan daerah," imbuhnya.

Berdasarkan informasi, Pertamina

akan membangun sentral truk terminal dan sekarang sedang dalam proses pengurusan legalisasi tanah. "Kami harapkan, oleh Komisi VII DPR agar dapat diakselerasi sehingga saat pembangunan ini berjalan informasinya tersebar sehingga akan menyerap tenaga kerja serta mengurangi pengangguran," harap Mustakim. (HR), FOTO : EKA HINDRA/ PARLE/HR

PENYALURAN PIP HARUS DIPERMUDAH

Penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) bagi para siswa miskin harus dipermudah aksesnya. Selama ini para siswa miskin di daerah kerap sulit mencairkan dana PIP di bank pelaksana. Belum lagi banyak temuan potongan atas dana PIP dari kelurahan hingga sekolah.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Panja PIP Komisi X DPR RI dengan bank pelaksana, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan BPS Jawa Timur di Surabaya, Jumat (27/11). Para anggota Komisi X yang hadir dalam pertemuan tersebut berharap, akses PIP terus dipermudah sistemnya. Bila perlu ada teller khusus untuk para siswa penerima PIP di BRI dan BNI yang ditunjuk sebagai bank pelaksana.

Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisyam yang memimpin delegasi Panja ini, mengatakan, kebijakan pemerintah untuk PIP harus selalu diawasi. Dan Surabaya dipilih sebagai kota tujuan pengawasan kali ini, karena merupakan kota besar yang pelayanan administrasinya sudah bagus. Bila di Surabaya tidak baik layanan PIP-nya, maka di daerah lain pun dipastikan tidak baik.

Program unggulan pemerintah ini diharapkan bisa mengurangi angka putus sekolah di daerah. Hanya persoalannya, data sekolah dan data bank kerap berbeda. BRI dan BNI wilayah Jatim, misalnya, hanya menerima data dan anggarannya dari kantor pusat di Jakarta. Dalam pertemuan di kantor



Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisyam

BNI wilayah Jatim tersebut, terungkap, banyak perubahan data penerima PIP, lantaran ada anak yang tadinya dari keluarga mampu menjadi tidak mampu. Pergeseran status keluarga ini berfluktuasi.

Inilah yang diserukan oleh Komisi X DPR agar selalu ada sinkronisasi data dari bank pelaksana dengan data yang dimiliki sekolah dan kelurahan setempat. Pihak bank diminta rajin meninjau sekolah-sekolah yang terdapat siswa penerima PIP agar selalu ada sinkronisasi. Sementara untuk kemudahan akses, mobil bergerak milik bank juga diharapkan bisa melayani pencairan dana PIP ke sekolah-sekolah.

BNI Surabaya sendiri seperti disampaikan CEO-nya, mengungkapkan, ada sekitar 5.795 siswa penerima PIP yang

ditargetkan tahun ini atau sekitar Rp 5,59 miliar. Sementara BRI Surabaya menargetkan lebih dari Rp 26 miliar tersalurkan ke penerima PIP.

Ferry Kase Anggota Komisi X yang ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan, karena program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sudah digantikan dengan PIP, seharusnya sisa anggaran BSM dikembalikan dulu ke kas negara. Pada 2013 saja pemerintah terdahulu menganggarkan sekitar Rp 2,90 triliun untuk seluruh Indonesia.

Ferry juga berharap, para siswa penerima PIP diajarkan bagaimana tata cara pencairannya oleh bank dan sekolah. Tak perlu surat pengantar dari sekolah bila siswa tersebut jelas-jelas sudah tercantum sebagai penerima PIP. Para oknum di sekolah, kelurahan, hingga RT/RW harus diawasi pula agar tak ada pemotongan dana bagi siswa penerima PIP. Siswa miskin harus betul-betul dibantu mendapatkan PIP.

Selain Ridwan Hisyam (F-PG) dan Ferry Kase (F-Hanura), para anggota Komisi X yang hadir mengikuti kunjungan ke Jatim ini adalah Asdy Narang (F-PDI Perjuangan), Puti Guntur Soekarno (F-PDI Perjuangan), Isma Yatun (F-PDI Perjuangan), Popong Otje Djundunan (F-PG), Ida Bagus Putu Sukarta (F-Gerindra), Dwita Ria Gunadi (F-Gerindra), Latifah Shohib (F-PKB), dan Elviana (F-PPP). (MH) FOTO: HUSEN/ PARLE/HR

KOMISI X TINJAU PELAKSANAAN PIP DI JATIM

Komisi X DPR RI meninjau langsung penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) di Jawa Timur (Jatim). Tim kunker ini juga merupakan Panja PIP yg secara khusus ingin melihat dari dekat problem PIP di daerah.

Tim Komisi X yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisyam bertemu dengan Direksi bank Pelaksana PIP, Dinas Pendidikan, dan Dewan Pendidikan Jatim. Bertempat di kantor BNI Surabaya, Jumat (27/11), pertemuan membahas ba-



nyak persolan lapangan yang masih menghambat penyaluran PIP bagi para siswa miskin.

Seperti diketahui, PIP merupakan program unggulan pemerintah yang menggantikan program BSM dari pemerintah sebelumnya. Selain daya serapnya masih rendah, banyak kasus siswa penerima ganda, baik menerima PIP maupun Bantuan Siswa Miskin (BSM). Akurasi data penerima PIP kerap kurang akurat.

Usai pertemuan, tim kunker meninjau langsung dua sekolah yang menjalankan program PIP. Tim kunker menyambangi SDN Margorejo I, Wonocolo, Surabaya. Kunjungan dilanjutkan ke STM Negeri 3 Surabaya. Umumnya dua sekolah itu belum menerima pencairan dana PIP, walau data penerimanya sudah disiapkan pihak sekolah. (MH) FOTO : HUSEN/ PARLE/HR

Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisyam bertemu dengan Direksi Bank Pelaksana PIP

DATA AKURAT DAN KOMPREHENSIF SANGAT VITAL UNTUK PENCAPAIAN TPB

Dalam rangka menjalankan peran diplomasi DPR, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) melakukan kunjungan kerja ke Meksiko. Kunjungan tersebut untuk memperdalam upaya penguatan peran parlemen dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan juga peningkatan *awareness* di level pemangku kepentingan untuk isu-isu TPB.

Delegasi BKSAP DPR dipimpin Wakil Ketua BKSAP Rofi Munawar (F-PKS), dan Anggota Delegasi Dwi Aroem Hadiatie (F-PG), Alimin Abdullah (F-PAN), Jazuli Juwaini (F-PKS), Syofwatillah Mohzaib (F-PD), Hamdhani (F-Nasdem) dan Nihayatul Wafiroh (FPKB).

Pada Kamis (26/11), Delegasi BKSAP DPR menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Meksiko di Kantor Kementerian Luar Negeri Meksiko, Kota Meksiko. Pertemuan tersebut membahas ketersediaan data dan indikator yang dirumuskan oleh Pemerintah Meksiko untuk mendukung TPB.

Meksiko diketahui sangat ideal dalam pengayaan data mengingat Meksiko menjadi wakil dari Amerika Tengah dan Selatan dalam keanggotaan Inter-Agency Expert Group on Sustainable Development Goals Indicators (IAEG-SDGs). Sementara wakil dari Asia Tengah, Timur, Selatan dan Tenggara adalah: China, India, Kyrgyzstan dan Filipina.

"Ketersediaan data yang akurat dan komprehensif sangat vital untuk mendukung pencapaian TPB. Data sangat penting untuk perumusan kebijakan yang tepat sekaligus evaluasi monitoring agar data kuantitatif yang diperoleh dapat bersinergi dengan situasi kualitatif lapangan," ungkap Rofi Munawar.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Pemerintah Meksiko yang turut hadir adalah Asisten Dirjen Urusan TPB Kementerian Luar Negeri Damaso Luna, Adolfo Aruso dari Perwakilan Kantor Kepresidenan Meksiko, Manuel Cuellar dari Direktur Sistem Kelembagaan Pengarsipan dari National Institute of Statistics and Geography of the Mexico (INEGI).

Dalam kesempatan tersebut, Delegasi BKSAP mendapatkan fakta bahwa perumusan dan pengembangan data indikator baik untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (TPM) maupun TPB dilakukan oleh INEGI, semacam Badan



Delegasi BKSAP DPR melakukan kunjungan kerja ke Meksiko

Pusat Statistik (BPS).

INEGI merupakan badan otonom yang bebas dari kepentingan politik, memiliki sumber daya memadai dan penggunaan datanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara maupun publik. INEGI berdiri atas mandat dari Konstitusi Meksiko Pasal 26 yang memandatkan negara untuk membentuk Sistem Nasional Statistik dan Informasi Geografi.

"Bisa dikatakan INEGI adalah satu-satunya badan otonom statistik di dunia. Kualitas data dan pertanggungjawabannya dapat dipertanggungjawabkan karena lepas dari kepentingan politik apapun," urai Manuel Cuellar INEGI.

Beberapa paparan mengenai struktur INEGI dijelaskan dengan cukup detail oleh Manuel termasuk dalam pembagian sub-sistem data yakni: Pemerintahan, Keamanan Publik dan Keadilan; Demografi dan Sosial; Geografi dan Lingkungan; dan, Ekonomi. "Produksi, integrasi dan diseminasi dapat menjadi informasi spesifik sesuai kepentingan nasional," lanjutnya.

Dalam isu agenda pembangunan global, Meksiko mengemban tugas perumusan-perumusan indikator melalui kerjasama INEGI. Bahkan dalam beberapa aspek TPM, Meksiko telah melakukan perumusan yang jauh melampaui TPM.

Berdasarkan paparan INEGI, institut tersebut telah merumuskan 22 indikator yang jauh melampaui MDGs, 10

indikator yang memerlukan formulasi ulang dan 7 indikator baru usulan Meksiko. INEGI juga mempresentasikan Sistem Informasi MDGs yang merupakan sistem informasi berbasis online dengan paparan data yang detail dan komprehensif dan tersedia secara interaktif hingga di level daerah. Sistem tersebut juga memaparkan pembidangan data per isu. Sistem tersebut dapat dilihat secara *online* melalui <http://www.objetivosdesdesarrollodemilenio.org.mx/>

Saat ini, Meksiko juga tengah mengembangkan sistem serupa untuk TPB yang disebut *Data Platform for Sustainable Development*. Ke depan, kerja-kerja dalam pencapaian TPB di Meksiko akan didukung oleh Komite SDGs yang dibentuk secepatnya. Komite SDGs ini akan mensinergikan kerja-kerja Pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil. “LSM yang berkaitan dengan TPB telah siap sedia untuk bekerjasama,” sambung Damaso Asisten Dirjen Urusan TPB Kementerian Luar Negeri.

Yang patut menjadi pertimbangan pula, lanjut Damaso adalah mekanisme pelaksanaan TPB agar sinergis dengan pembangunan nasional. Damaso mencontohkan Guatemala dan Colombia yang telah berkomitmen untuk mengintegrasikan TPB ke dalam rencana pembangunan nasional mereka. Dalam hal pengembangan data dan indikator, negara-negara yang tergabung dalam *System of Central American Integration* (SCAI) telah bersepakat akan mengikuti model yang disiapkan oleh INEGI.

Dari hasil paparan tersebut, Rofi mengungkapkan bahwa terkait kesiapan data dan pengembangan indikator, Meksiko telah memiliki kesiapan konsep hingga mekanisme implementasinya ke depan. Dia berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi semacam bahan evaluasi agar parlemen dapat bersikap kritis kepada pemerintah terkait rencana pencapaian TPB ke depan. (BKSAP/SKRI)/FOTO:DOC.BKSAP/PARLE/IW

PERLU KERANGKA LEGAL KUAT DUKUNG PENCAPAIAN TPB

Keberadaan kerangka legal yang kuat dalam pemenuhan hak-hak publik terbukti dapat mendukung kesuksesan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Hal ini terungkap ketika Delegasi BKSAP yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP, Rofi Munawar (F-PKS), saat mengunjungi Meksiko untuk mendalami upaya Kongres Meksiko, baik DPR maupun Senat Meksiko dalam upaya pengarusutamaan isu TPB di Parlemen, di Gedung Camara Diputados (DPR Meksiko), Meksiko, Rabu (25/11/15).

“Meksiko kami kunjungi dengan pertimbangan bahwa Parlemen Meksiko pro-aktif dalam isu-isu terkait TPB,” kata Rofi.

Tujuan kunjungan Delegasi BKSAP ke Meksiko ini juga dilakukan untuk memperdalam dan mendukung penguatan peran parlemen dalam pencapaian TPB. Parlemen memiliki peran aktif dan signifikan dalam TPB yang juga ditegaskan dalam Deklarasi KTT Dunia *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Kunjungan ini diikuti oleh Anggota BKSAP Dwi Aroem Hadiatie (F-PG), Alimin Abdullah (F-PAN), Jazuli Juwaini (F-PKS), Syofwatillah Mohzaib (F-PD), Hamdhani (F-Nasdem) dan Nihayatul Wafroh (F-PKB).

Saat bertemu dan berdialog dengan jajaran Komisi Pembangunan Sosial Parlemen Meksiko, Delegasi BKSAP menerima beragam paparan presentasi



Wakil Ketua BKSAP, Rofi Munawar (F-PKS)

dari komisi tersebut terkait program-program yang mereka lakukan yang ujungnya dapat mendukung pencapaian TPB.

Komisi Pembangunan Sosial menerangkan bahwa program TPB telah berlangsung dan dijalankan di Meksiko sejak lama. Karena hal ini merupakan agenda pembangunan yang menyempurnakan *Millennium Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Millennium (TMP).

“Kerangka hukum yang tersedia adalah dimulai dari konstitusi Meksiko yang memperhatikan secara fundamental hak-hak mendasar rakyat Meksiko, kami juga memiliki UU Pembangunan Sosial, UU tentang Tanggung Jawab Fiskal dan Anggaran, hingga ke Keputusan Presiden tentang

Pembentukan Sistem Nasional untuk Memerangi Kelaparan,” jelas Sekretaris Komisi Pembangunan Sosial, Dip. Alejandro Armenta Mier.

Bahkan, berdasarkan laporan TPM tahun 2015, sebanyak 85 persen dari tujuan-tujuan yang ada telah dicapai oleh Meksiko. Meksiko telah mencapai kemajuan berarti dalam aspek pendidikan, misalnya telah mengurangi tingkat buta huruf dari 4,6 persen (1990) menjadi 1,4 persen (2015).

“Pada indikator kemiskinan, Meksiko telah mengurangi, berdasarkan kriteria kemiskinan internasional (hidup di bawah US 1.25\$ per hari), dari 9.3% menjadi 3.7% pada tahun 2015,” terang Alejandro.

Pada kesempatan terpisah, terkait upaya pengarusutamaan parlemen terkait isu TPB, Kongres Meksiko tengah mendiskusikan mekanisme legal yang dapat mendukung TPB. Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Organisasi Internasional, Senadora Laura Rojas menerangkan adanya keinginan dari anggota parlemen Meksiko untuk membentuk mekanisme baru mengenai bagaimana Senat dan DPR dapat bekerja untuk mendukung suksesnya pencapaian TPB.

“Di tingkat Kongres Meksiko saat ini tengah berlangsung diskusi mendalam mengenai pembentukan komisi bikameral (gabungan antara Senat dan DPR) terkait TPB. Tetapi ada tantangan terkait hal itu, mengingat kemudian tidak semua elemen dapat masuk ke

wilayah mekanisme tersebut. Opsi lainnya adalah untuk membentuk semacam *working group* di masing-masing kamar yang dapat membuka ruang bagi semua pihak untuk terlibat,” paparnya.

Isu TPB, menurut Laura, saat ini tengah menjadi perdebatan hangat di tingkat Senat. Bahkan, beberapa anggota Senat saat ini tengah melakukan kajian dan analisis mendalam terkait TPB dari beragam aspek. Penjelasan ini disampaikan Laura Rojas merespon pendalaman diskusi yang disampaikan BKSAP terkait upaya keterlibatan efektif dari perspektif Senat Meksiko,

tahapan kerja hingga fokus-fokus Meksiko ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Delegasi BKSAP sepakat dengan paradigma baru mengenai pengukuran tingkat kemiskinan yang tidak hanya dan tidak harus diukur via pendapatan per kapita semata. BKSAP berupaya lebih jauh untuk mendalami aspek hal tersebut sehingga aspek-aspek kemiskinan multidimensi dapat tersentuh secara lebih komprehensif.

“Meksiko menyebutnya sebagai kemiskinan multidimensional dan mengatasinya dalam beragam aspek, khu-

susnya yang terkait dengan pemenuhan Ham dalam kacamata pembangunan sosial,” jelas Laura.

Dalam diskusi dengan kedua kamar parlemen Meksiko tersebut beberapa hal menjadi catatan penting yakni mengenai ketersediaan indikator yang jelas dan detail, mekanisme komunikasi dan kolaborasi terkait TPB antara parlemen dengan pemerintah serta dukungan pendanaan untuk pencapaian SDGs ke depan yang implementasinya akan dimulai pada tahun depan.

(BKSAP,SFI)/FOTO:DOC.BKSAP/PARLE/IW

PENGUNAAN BOPTN DIHARAPKAN DAPAT TUTUP BIAYA OPERASIONAL

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Nuroji mengatakan, tujuan kunjungan kerja spesifik mengenai panja BOPTN ini untuk menggali dan menyerap aspirasi berbagai persoalan atau tantangan tentang BOPTN. Selain itu, menerima masukan dari perguruan tinggi maupun mahasiswa dalam hal ini diwakili BEM terhadap pelaksanaan BOPTN.

Pelaksanaan BOPTN berdasarkan Undang-Undang No12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. BOPTN adalah dana subsidi pemerintah kepada PTN dalam pelaksanaan sistem pembayaran UKT agar biaya yang dibayar per semesternya tetap bisa mencapai angka biaya kuliah tunggal (BKT) yang ditetapkan kementerian.

“Undang-undang ini mengamanatkan adanya alokasi dana bantuan operasional PTN dan dialokasikan sedikitnya 30 persen dari dana tersebut untuk dana penelitian PTN dan PTS,” jelasnya pada saat kunker di Unila, Jumat (27/11).

Sedikitnya terdapat 7 perguruan tinggi negeri di Provinsi Lampung. Ia menambahkan, jenis bantuan pemerintah provinsi kepada perguruan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Nuroji

tinggi melalui dana hibah tahun 2015, untuk Universitas Lampung sebesar Rp 22,494,844,000 dan Institut Teknologi Sumatra (ITERA) di 2013 sampai 2015 belum menerima BOPTN.

Mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa se Lampung mengatakan bahwa BOPTN yang di keluarkan pemerintah masih kurang dan sering terlambat dalam pencairannya.

Menurut politisi Gerindra ini, ma-

salah yang sering muncul dalam pencairan dana BOPTN rata-rata dilakukan pada semester dua anggaran (bulan Juli) sehingga daya serap relatif rendah, proses pencairan dana BOMPTN harus melalui KPPN dan sejak tahun 2015 terjadi perubahan Sistem Aplikasi Pencairan (SPAN SAKTI) yang baru aktif pada bulan Agustus 2015.

Pada bulan Mei terjadi perpindahan atau pergantian nomenklatur kementerian dari Kemendikbud ke Kemenristek dan Dikti, sehingga terjadi *cut off* yang memakan waktu kurang lebih dua bulan sehingga masih banyak *trouble* pada sistem tersebut yang menyebabkan lambatnya proses pencairan anggaran.

Hal senada disampaikan anggota komisi x DPR RI Nurhasan Zaidi dari fraksi PKS, ia mengharapkan kunjungan kerja Komisi X DPR RI dapat meningkatkan percepatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Provinsi Lampung.

“Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi di Indonesia,” ungkapnya. (ANDRI)/FOTO:

ANDRI/PARLE/HR

Komisi II Temukan Adanya Mutasi ASN Oleh Plt Kepala Daerah

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak harus tetap menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara pasal 2 yang menyebutkan salah satu asas ASN adalah netralitas.

Demikian dikatakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR Sukiman, ke Propinsi Kalimantan

Barat pada saat melakukan pertemuan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi Kalbar, serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar di Kantor Gubernur Kalbar Kamis (26/11) siang.

Menurut Sukiman, asas netralitas berarti setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua pihak golongan dan partai politik.

Menjelang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun ini, terdapat beberapa kasus tentang mutasi ASN yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Daerah yang antara lain terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu dan di Kabupaten Melawi. Padahal jika ada pejabat yang melakukan mutasi pegawai jelas dilarang dalam pasal 132A Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 ten-



Anggota Komisi II DPR Sukiman

tang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selain itu, lanjut Sukiman, dalam

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pasal 162 ayat (3) menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, atau Walikota jelas dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/kota, dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Dia juga menyebutkan dalam ketentuan lain, didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 yang menyebutkan larangan keterlibatan ASN dalam pasal 70 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota polri dan anggota TNI. (SPY,MP)/FOTO: SUPRIYANTO/PARLE/IW.

PANJA BOPTN KOMISI X HIMPUN MASUKAN KE UNIVERSITAS LAMPUNG



Suasana Raker Tim Panja BOPTN Komisi X dengan beberapa Universitas di Unila

Tim Panitia Kerja Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Panja BOPTN) Komisi X DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Universitas Lampung, untuk menghimpun masukan dari berbagai akademisi, Ju'mat (27/11) di Bandar Lampung.

Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Nuroji dari Fraksi Gerindra mengadakan pertemuan dengan

Rektor Universitas Lampung, Rektor Institut Teknologi Sumatera, Direktur Politeknik Negeri Lampung, BEM Universitas Universitas Lampung dan BEM Institut Teknologi Sumatera serta BEM Politeknik Negeri Lampung di Ruang Sidang Rektorat Universitas Lampung.

Menurut Nuroji, fokus kunjungan spesifik kali ini adalah untuk mendengar secara langsung bagaimana

penyerapan dan pengelolaan BOPTN di Perguruan Tinggi Negeri penerima di Provinsi Lampung selama ini.

"Kami ingin menggali dan menyerap masukan terkait berbagai persoalan dan tantangan yang mengemuka dalam pelaksanaan BOPTN Tahun 2015, khususnya di Provinsi Lampung," kata Nuroji dalam sambutannya.

Lebih lanjut, politisi Gerindra ini mengatakan, yang mendasari Panja BOPTN ini dibentuk karena kurang meratanya pembagian alokasi anggaran BOPTN, kurang transparansi sistem penggunaan anggaran di universitas yang ada di Indonesia.

"Komisi X DPR menyepakati membentuk Panja BOPTN untuk mendorong lahirnya kebijakan pengembangan pola pengelolaan yang komprehensif, efisien, efektif dan akuntabel. Sehingga manajemen pengelolaan keuangan PTN lebih profesional, transparan yang akan membuka akses pendidikan tinggi lebih terjangkau dan bermutu," jelas Nuroji.

Ikut dalam rombongan Tim Kunker Panja BOPTN adalah anggota Komisi X DPR RI Moreno Soeprapto, Sofyan Tan, Lucky Hakim, Ferdiansyah, Anas Thahir, dan Nurhasan Zaidi. (ANDRI)/FOTO: ANDRI/PARLE/HR



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjadi pembicara dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) dengan tema "Peran Lembaga Yudikatif dan Legislatif dalam Pemberantasan Korupsi" di Gedung Nusantara V, Kamis (3/12).
Foto: Jaka Nugraha/Parle/HR



Komisi I DPR RI dipimpin Ketua Komisi Mahfudz Sidiq menerima Delegasi Parlemen Tiongkok di Gedung Parlemen Senayan, Kamis (3/12/2015)
Foto : Naefuroji/Parle/HR



Sidang MKD DPR meminta keterangan Menteri ESDM Sudirman Said (kiri) dan Dirut Freeport Maroef Sjamsoeddin (kanan), Rabu dan Kamis (2, 3/12)
Foto : Iwan Armanias/Parle/HR

